

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang : Banyumedia.
- _____, 2013, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang : Banyumedia.
- Dellyana, Shant.1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Penerbit Liberty
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga.
- Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Mitra Buana Media.
- Kurniawan, Nalom& Putri, Mery Christian. 2021. *Korvergensi Hukum dan Teknologi dalam Penegakan Hukum pada Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Muhammad Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- P.A.F.Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Wiyono, 2016, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- RM Surachman & Jan S. Maringka, 2015, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Satjipto Rahadjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Sidik Sunaryo. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang : UMM Press.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Solikin, Nur. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan. CV. Penerbit Qiara Media
- Surachmin & Suhandi Cahaya. 2015. *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui untuk Mencegah*, Jakarta : Sinar Grafika.

JURNAL, ARTIKEL DAN PENELITIAN ILMIAH

- Ali, Mahrus. 2008. *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif*

- Analisis Ekonomi Atas Hukum). Jurnal Hukum Vol 15. No.2: 223 - 238
- Cahyaningsi, Diana Tantri. 2020. Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot. Jurnal RechtsVinding. Vol 1. No (1) : 1-7
- Faisal Santiago. 2017. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*. Pagaruyuang Law Journal Vol. 1, No. 1, Juli 2017.
- Hadi, Naufal Akbar Kusuma. 2022. Penegakan Hukum di Indonesia di Lihat dari Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol 10. No. 2 : 227-240
- Jimly Asshiddiqie. Artikel Penegakan Hukum. hlm. 1 pada halaman https://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
- Nola, Luthvi Febryka. 2016. Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia(TKI). Negara Hukum. : Vol. 7. No. 1 : 35-52
- Palsari, Cahya. 2021. Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. e-Journal Komunitas Yustisia. Vol 4. No 3 : 940-950
- Pane, Musa Darwin. 2017. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jurnal Media Hukum. Vol 24. No.2 : 147-155
- Rahimah. 2018. Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Kasus Pengadaan Videotron ; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomot : 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT/PST). Reformasi Hukum, Vol. XXII No. 2 : Hal. 271 – 294
- Sanyoto. 2008. Penegakan Hukum di Indoensia. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 : 199-204
- Setiadi, Wicipto. 2018. Penegakan Hukum : Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. Majalah Hukum Nasional. Vol. 48. No 2 : 1-22
- Tantyo, M. Gian. 2020. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Provinsi Lampung. Corruptio. Vol 01. Issue 2 : 117-128
- Winarno Yudho & Heri Tjandrasari. 1987. *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Hukum & Pembangunan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Permohonan Uji Materi Pasal 30 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Registrasi No 70/PUU/XXI/2023

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang R.I. Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang R.I. Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.